

Vol.1

ISSN. 2540-783X

PROSIDING

2016

SNPK

Seminar
Nasional
Perbatasan
&Kemaritiman

“Penguatan Daerah Perbatasan
Yang Berbasis Kemaritiman”

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jl.Raya Dampak, Telp. (0771) 7003550, Tanjungpinang 29123
Email : -snpk.prodiilmuhukum@gmail.com
-programstudilmuhukum@yahoo.com



UMRAH
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI



Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

SNPK

SEMINAR NASIONAL PERBATASAN, KEMARITIMAN
& CALL FOR PAPERS 2016

SEMINAR NASIONAL PERBATASAN, KEMARITIMAN
& CALL FOR PAPERS 2016

"PENGUNTAN DAERAH PERBATASAN YANG BERBASIS KEMARITIMAN"
GEDUNG AUDITORIUM UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG, 28 SEPTEMBER 2016



PROSIDING

Volume. 1 Bulan September 2016 ISSN 2540-783X

Penyelenggara :

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jl. Raya Dompok Gedung Prodi Ilmu Hukum
FISIP UMRAH Tanjungpinang (071) 29115
Hp: 085271816991 (Irmawati)
E-mail: SNPK.ProdiIlmuHukum@gmail.com

**SUSUNAN PANITIA
SEMINAR NASIONAL PERBATASAN DAN KEMARITIMAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Pelindung

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Drs. H. Soehaji, M.Si

Pemanggung Jawab

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Dr. Oksep Adhyananto, SH, MH

Tim Reviewer

Prof. Dr. Syafiqulhikmah, SH, MCL
Prof. Dr. Ellyda Chaidi, SH, M.Hum
Dr. Mewasita Indra, SH, MH
Dr. Erlianto, SH, MH
Dr. Oksep Adhyananto, SH, MH
Dr. Nofrizal, S.Pi, M.Si
Dr. Febrina Lestari, M. Si

Panitia Pelaksana

Kemas : Irmuan, SH, MH
Sekretaris : Choliki Try Ramadhani, SH
Bendahara : Emry Mandasari, S.Pd

Editor

Fery Ikhwan Saepta, SH, MH
Marika Rani, SH, MH
Endri, SH, MH
Desat Haryanti, SH, MH
Suryadi, MH
Muhammad Fajar Halayat, SH, MH

Desain & Tata Letak

Stati
Nova Andriadi, S.Pi
Diti Hamdi Mahfudin, S.Sos
Zalqarna, S.Sos

DAFTAR ISI

Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	ii
Sambutan Ketua Panitia	ii
KONFLIK NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA TERHADAP KEPULAUAN SPRATLY	1
<i>Ady Mawardi</i>	
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN:	10
Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Agenda Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015 <i>Eti Darmawati & Nazki</i>	
KONSTRUKSI HUKUM SISTEM Pemerintahan KEMARITIMAN	27
<i>Evy Hajar Abri</i>	
ANALISIS PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA	38
<i>Evely</i>	
SINERGI PENGELOLAAN KELAUATAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENGUATAN POROS MARITIM INDONESIA	51
<i>Agus Priharsanto PS & Fakhri Muz</i>	
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT KEPULAUAN (Perspektif Sosiologi Ekonomi)	63
<i>Sajito & Rendra Setyadibyo</i>	
COMMUNITY DEVELOPMENT DENGAN INTERNALISASI NILAI BUDAYA MARITIM DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK MEMPERKUAT PROVINSI BERBASIS KEMARITIMAN	70
<i>Selamat Mubliq & Rendra Setyadibyo</i>	
TANGGUNG JAWAB BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	85
<i>Titiwati S</i>	

REORGANISASI SEBAGAI BAGIAN RESTRUKTURISASI UTANG KORPORASI BAYANGAN DI PERBATASAN ANTAR NEGARA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS BATAM	96
<i>Floriana Hadri Priyo Aniboro</i>	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM <i>UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982</i> ...	117
<i>Fahriana Sidiqah</i>	
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH	124
<i>Endah Pujiantari & Dewi Tuti Maryati</i>	
PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DI KAWASAN PERBATASAN (Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Sebagai Garda Terdepan Kedaulatan Bangsa Di Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau)	131
<i>Rahma Pengarneni & Rudi Subyakti</i>	
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN PUKAT HELA DAN PUKAT TARIK DI KOTA TANJUNGPINANG	145
<i>Nur A. Dwi Putri</i>	
DINAMIKA DISTRIBUSI BHM DI DAERAH KEPULAUAN	154
<i>Ahli Saragi, Muhammad & Eko Sarwaini</i>	
PENEGAKAN HUKUM DI ZONA TAMBAHAN	164
<i>Tony Mchael</i>	
PEMBERDAYAAN KEKAYAAN LAUT: SOLUSI PEMENUHAN HAK PENGHIDUPAN YANG LAYAK PADA SUKU LAUT DI PULAU GARA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	174
<i>Wibacherly Tere dan Winda Fitri</i>	
PELAN KPPU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTER MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU ...	188
<i>Muhammad Fajar Hidayat</i>	
SENGKITA PERBATASAN DAN OTONOMI DAERAH	198
<i>Amral Sari Singar</i>	
PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PROSPEK DILAKUKAN PENGUJIAN DI PERADILAN (<i>JUDICIAL REVIEW</i>)	204
<i>Siparto</i>	

JAUH PANGGANG DARI API: KESENJANGAN KUALITAS PELAYANAN JASA PELABUHAN DI INDONESIA ... 214	
<i>Rizki Eka Hidayatya, Afkandi, & Refinar Hidayat</i>	
PERANAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENJAGA KEDAULATAN DAN KEARIFAN LAUT 220	
<i>Bachmad Sofiatul & Dwi Hono</i>	
JARINGAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI 243	
<i>Suryaningih</i>	
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TANAH MASYARAKAT PESISIR TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT 257	
<i>Maryata Nisul & Ulfah Maswadah</i>	
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN 268	
<i>Adhira</i>	
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN KEBIJAKAN FREE TRADE ZONE (FTZ) DI KAWASAN KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU 274	
<i>Kurniawan</i>	
SEGI POSITIF DAN NEGATIF DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BAHAN BAKU TAMBANG DAN MINERAL DIKAJI DARI ASPEK HUKUM INDONESIA 285	
<i>Suzuki Febrianto</i>	
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DAERAH: STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ZAKAT 300	
<i>Dede Rusli A., Rizki Eka Hidayatya</i>	
MEMBANGUN KEKUATAN MARITIM BERBASIS PEMBANGUNAN MANUSIA (HUMAN DEVELOPMENT) DI KEPULAUAN RIAU 314	
<i>Aylin</i>	
PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PENAMPUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 328	
<i>(Studi Pada Penempatan TKI Di Kota Tanjungpinang)</i> <i>Oleng Adhyanoto</i>	
RESIPROSITAS NELAYAN TRADISIONAL PERBATASAN DENGAN KELOMPOK NELAYAN ASING DI KECAMATAN BUNGURAN UTARA PULAU NATUNA 339	
<i>Nasir Rahenywan</i>	

JAUH PANGGANG DARI APE: KESENIJANGAN KUALITAS PELAYANAN JASA PELABUHAN DI INDONESIA ..	214
<i>Rayu Eko Nugroho, Afandi & Rahmat Hidayat</i>	
PERANAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENJAGA KEDAULATAN DAN KEARIFAN LAUT	228
<i>Rachmad Safa'ir & Dwi Irena</i>	
JARINGAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI	243
<i>Suryaningrum</i>	
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TANAH MASYARAKAT PESISIR TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT	257
<i>Muhammad & Ulfahussolah</i>	
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN	268
<i>Ashraf</i>	
EKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN KEBIJAKAN FREE TRADE ZONE (FTZ) DI KAWASAN KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU	274
<i>Kusriwan</i>	
SEGI POSITIF DAN NEGATIF DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BAHAN BAKU TAMBANG DAN MINERAL DIKAJI DARI ASPEK HUKUM INDONESIA	295
<i>Suzuki Febrizeto</i>	
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DAERAH: STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ZAKAT	306
<i>Dede Rizal & Rayu Eko Nugroho</i>	
MEMBANGUN KEKUATAN MARITIM BERBASIS PEMBANGUNAN MANUSIA (HUMAN DEVELOPMENT) DI KEPULAUAN RIAU	314
<i>Afiani</i>	
PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PENAMPUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015	328
<i>(Studi Pada Penempatan TKI Di Kota Tanjungpinang)</i> <i>Oleng Adharyanto</i>	
BESIPROSITAS NELAYAN TRADISIONAL PERBATASAN DENGAN KELOMPOK NELAYAN ASING DI KECAMATAN BUNGURAN UTARA PULAU NATUNA	339
<i>Nisik Rahawati</i>	

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM
UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982**

Oleh : Fithriatus Shalihah

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau – email : fithriatus@law.uir.ac.id

Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan 770 suku bangsa, 726 bahasa, dan 19 daerah hukum adat. Secara fisik antar suku budaya dan budaya lain karena seluruh perairan yang ada di nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah. Dalam proses perkembangannya, tingkat integrasi dapat berbeda-beda baik secara geografis maupun secara politis, ekonomis, social dan cultural. Dengan diumumkannya Deklarasi Juanda ke dunia internasional pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri RI Djoeanda, patut disyukuri jika tidak karena pengumuman tersebut maka wilayah Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai sebuah pulau dan perairan di antara pulau merupakan perairan internasional.

Konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelagic State*) di akui dunia setelah *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal pada tanggal 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pengakuan Indonesia sebagai Negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah Negara. Luas perairan menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 dalam *Soewito et al 2000*). Namun penetapan batas wilayah perairan laut tersebut, yang merupakan aturan peninggalan Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah konsep Nusantara (*Archipelago*) yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Serta wawasan nusantara adalah sebagai argument untuk mempersatukan pulau-pulau yang tersebar dari ujung Sumatera sampai Papua. Hanya dengan konsep penetapan batas wilayah laut sejauh 12 mil saja akan membuat adanya bagian laut bebas di dalam pulau-pulau Indonesia yang dapat diinterpretasikan sebagai laut bebas. Dengan konsepsi Negara kepulauan maka kelemahan itu berhasil ditutupi. Semua laut di antara pulau-pulau atau di tengah kepulauan Indonesia sudah tidak dihitung lagi sebagai laut internasional, tetapi sebagai laut pedalaman yang termasuk sebagai kawasan laut territorial dari suatu Negara kepulauan.

Keywords : Sovereignty, Archipelagic State, UNCLOS 1982

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM
*UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982***

Oleh : Fithriatus Shalihah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau – email : fithriatus@law.uir.ac.id

A. Latar Belakang

Mengingat adanya beberapa kelemahan atas hukum yang mengatur mengenai laut (perairan) di wilayah Negara Republik Indonesia, yang masih merupakan warisan atau produksi Pemerintah colonial Hindia Belanda dahulu, dengan tolok ukur jarak 3 mil laut dari pantai tersebut, ternyata ada juga negara-negara lain yang menyimpanginya, yaitu negara-negara Skandinavia sejauh empat mil, dan Spanyol sejauh enam mil dari pantai.²Karena itu, maka wajarlah apabila Pemerintah Republik Indonesia mempunyai gagasan baru untuk merombak total dan kemudian mengembangkan ke aspek-aspek selanjutnya.

Perombakan yang dimaksudkan di atas untuk pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah RI dengan mengeluarkan pengumuman pada tanggal 13 desember 1957, yaitu disebut dengan Deklarasi 13 Desember 1957 atau kemudian lebih terkenal dengan deklarasi Juanda 1957, karena dibuat pada waktu pemerintahan dengan Perdana Menteri Ir. Djuanda.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh di seluruh wilayah nusantara, pertama kali dimunculkan dengan adanya “Deklarasi Juanda” pada tanggal 13 Desember 1957 yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rezim negara Kepulauan (*Archipelagic State*) sebagai dasar dari konsepsi kewilayahan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara. Deklarasi Juanda merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI mengenai wilayah perairan Indonesia yang isinya antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar,

¹ Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987, Hlm.31.

diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi RI. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 dalam *Soewito et al 2000*).

Namun penetapan batas wilayah perairan laut tersebut, yang merupakan aturan peninggalan Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Sehingga tulisan ini ingin membahas sebuah permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia menurut konsep negara kepulauan dalam *United Nation Convention on The law of The Sea (UNCLOS) 1982*.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Konsep Negara Kepulauan Dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*.

Beberapa pertimbangan yang mendorong pemerintah RI sebagai suatu negara kepulauan, sehingga mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia, adalah :

- a. Bahwa bentuk geografis Indonesia yang berwujud negara kepulauan, yang terdiri atas tiga belas ribu pulau-pulau, besar dan kecil yang tersebar di lautan;
- b. Demi untuk kesatuan wilayah NKRI, agar semua kepulauan dan perairan (selat) yang ada diantaranya merupakan kesatuan yang utuh, dan tidak dapat

dipisahkan antara pulau yang satu dengan lainnya, atau antara pulau dengan perairannya.

- c. Bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagaimana menurut “ Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” yang dimuat di dalam Staatblad 1939 No. 442 pasal 1 ayat (1) sudah tidak cocok lagi dengan kepentingan Indonesia setelah merdeka.
- d. Bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya.

Beberapa saat setelah pemerintah Republik Indonesia mengumumkan deklarasi Juanda 1957, ada beberapa negara yang menyatakan tidak dapat menyetujui klaim Indonesia atas perairan di antara kepulauannya; antara lain yaitu negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru. Sedangkan yang menyatakan mendukung hanya negara-negara Uni Soviet dan Republik Rakyat China.³

Konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelagic State*) di akui dunia setelah *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal pada tanggal 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pengakuan Indonesia sebagai Negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah Negara. Luas perairan menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang

³ Ibid.,Hlm. 190.

mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 dalam *Soewito et al 2000*).

Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggungjawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritime yang besar, kuat dan modern. Untuk mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya seperti : ikan, koral, mineral, biota laut, dan lain-lain diperlukan sumber daya manusia, peralatan dan teknologi kelautan yang modern serta dana yang sangat besar. Untuk dua hal tersebut (pengamanan dan pengelolaan), diperlukan batas laut yang pasti dan tegas sebagai pagar negara nusantara Indonesia dalam rangka melindungi, mengamankan dan menegakkan kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Penegakan kedaulatan dan pengamanan wilayah perairan bangsa dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan pada suatu negara yang batas-batasnya sudah pasti (diakui oleh kedua negara yang berbatasan dan untuk laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982) dan telah dilaporkan di PBB untuk mendapatkan pengakuan Internasional. Semakin diperlukan pentingnya penentuan (penegasan) batas-batas laut.

Setelah perundingan intensif selama kurang lebih 9 tahun berunding, pada tanggal 30 April 1982 telah dapat disahkan naskah konvensi hukum laut baru. Konvensi yang dikenal sebagai konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut ini ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994. Konvensi yang terdiri dari 320 pasal dan 9 *Annex* ini secara substantive memuat ketentuan-ketentuan baru yang membedakannya dengan konvensi 1958. Ketentuan tersebut antara lain mencakup tentang lebar laut wilayah 12 mil laut (laut territorial),

Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil laut), landas kontinen, hak-hak bagi negara yang tidak berpantai, rezim negara kepulauan, konsep *Common Heritage of Mankind*, pencegahan pencemaran di laut, selat untuk pelayaran internasional, dasar laut di luar batas yurisdiksi nasional, alih teknologi, penelitian ilmiah mengenai laut dan penyelesaian sengketa.

Jika kembali kepada isi pokok deklarasi Juanda bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia, maka konsep ini pada konferensi hukum laut di Geneva tahun 1958 belum berhasil mendapatkan pengakuan internasional. Namun baru pada konferensi hukum laut ke tujuh di Geneva tahun 1978 konsep ini ditanggapi dengan baik oleh masyarakat internasional pada umumnya, dimana konsepsi tentang wawasan nusantara mendapat pengakuan dunia. Hasil perjuangan yang berat selama 21 tahun mengisyaratkan kepada bangsa Indonesia bahwa visi maritime seharusnya merupakan pilihan yang tepat dalam mewujudkan NKRI.

Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982 yang hingga kini telah diratifikasi lebih dari 142 negara, negara-negara kepulauan (*Archipelagic State*) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), meskipun baru meratifikasinya. Hal itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tanggal 13 Desember 1995 tentang pengesahan UNCLOS. Penetapan ZEE mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut

lepas. Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah 2,7 juta km², sehingga menjadi sekitar 5,8 juta km.

Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu : 1) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), 2) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*) termasuk ke dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, 3) Laut Teritorial (*Teritorial Waters*), 5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive economic Zone*), 6) Landas Kontinen (*Continental Shelf*), 7. Laut Lepas (*High Seas*), 8) Kawasan Dasar laut Internasional (*International Sea- Bed Area*).

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur pemanfaatan laut sesuai dengan status hukum dari ke delapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di zona tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut internasional dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia.

Istilah wawasan nusantara sebenarnya baru dikenal pada Seminar Pertahanan Keamanan tahun 1966.⁴ Pada waktu itu, wawasan nusantara dipergunakan untuk

⁴ S. Toto Pandoyo, Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm.30.

mengembangkan kekuatan pertahanan dan keamanan yang terpadu, untuk menggantikan wawasan yang ada sebelumnya dan sifatnya sektoral, yaitu :

1. Wawasan Benua, yang diprakarsai oleh Angkatan Darat;
2. Wawasan bahari, yang diprakarsai oleh Angkatan Laut;
3. Wawasan Dirgantara, yang diprakarsai oleh angkatan Udara.⁵

Ketiga wawasan tersebut masing-masing sebagai perwujudan konsep kekuatan (*power concept*) sehingga menimbulkan adu kekuatan, yang dapat menimbulkan gejala-gejala atau ketegangan-ketegangan dalam kehidupan politik bangsa dan negara, atau kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya instabilitas nasional dalam kehidupan masyarakat negara. Lain halnya wawasan nusantara yang dikembangkan menjadi kebudayaan politik (*political culture*); dan merupakan milik bangsa dan negara Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun Prp.1960 dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1982, berarti tiga faktor pendukung untuk etas tegaknya negara kepulauan yaitu geografi, geopolitik, serta geostrategi, dijadikan wawasan.⁶ Jika melihat cara pengukuran yang ada sebelum konsep negara kepulauan menjadi ketentuan baru dalam hukum laut internasional, maka lebar laut wilayah diukur dari garis pangkal

⁵ Ibid, Hlm.30.

⁶ Dikatakan faktor geografi sebagai wawasan karena gambaran bumi Indonesia yang berujud negara Negara Kepulauan dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan faktor geopolitik ada pada Undang-Undang Nomor 4 Prp tahun 1960 itu sendiri, karena undang-undang tersebut merupakan kebijaksanaan atau keputusan politik yang dikaitkan dengan keadaan bumi usantara, supaya pula dan lautnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan faktor geostrategi dijadikan wawasan nusantara karena Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1962 tersebut menentukan dengan cara bagaimana sebaiknya (strategi) pelaksanaan penyatuan antara pulau dengan lautnya, mengingat bahwa perairan nusantara tersebut sebelumnya ada yang merupakan laut internasional, sehingga kapal asing bebas berlayar di sela-sela pulau-pulau tersebut. Di dalam hal bagaimana cara sebaiknya, ialah memberikan pengakuan dan jaminan atas adanya lalu lintas damai kapal asing di perairan nusantara, sehingga tidak mengundang tantangan, terutama dari luar (negara lain).

rendah yang akibatnya sebagian besar pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau akan mempunyai laut wilayahnya sendiri-sendiri dan sebagai akibatnya di antara laut-laut wilayah tersebut terdapat pula bagian-bagian laut lepas. Walaupun di antara ribuan pulau-pulau tersebut masih banyak terdapat pulau-pulau yang jaraknya satu sama lain kurang dari 6 mil dan dengan demikian mempunyai kantong-kantong laut lepas.

Banyaknya laut-laut wilayah dengan kantong-kantong laut lepas dalam kepulauan Indonesia akan menimbulkan banyak persoalan dan bahkan dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Dari segi keamanan, bentuk laut yang demikian akan menimbulkan banyak kesulitan dalam melakukan pengawasan. Dapat dibayangkan betapa berat dan rumitnya tugas kapal-kapal perang atau kapal-kapal pengawas pantai untuk menjaga perairan Indonesia terhadap usaha-usaha penyelundupan, kegiatan-kegiatan subversif asing dan usaha-usaha pelanggaran hukum lainnya.

Dari segi pelayaran, yang merupakan urat nadi bagi kehidupan rakyat Indonesia yang mendiami pulau-pulau yang betebaran sepanjang 3000 mil, adanya kantong-kantong laut lepas dengan rejim kebebasannya, semua negara dapat mengadakan segala macam kegiatan dan bahkan juga peperangan. Bisa dibayangkan jika perang yang terjadi adalah perang nuklir, maka sangat besar bencana yang menimpa penduduk dipulau-pulau yang berdekatan. Dampak lainnya jga akan mengenai kapal-kapal yang bukan merupakan kapal dari masing-masing negara yang sedang berperang, yang membawa bahan makanan dan sebagainya akan terhenti dan mengancam keselamatan awak kapalnya.

Dari segi ekonomi, sistem perairan yang dulu itu sangat merugikan Indonesia, karena negara-negara asing dengan kemajuan teknik penangkapan ikan adapat menghabiskan sumber-sumber ikan di lautsekitar pantai wilayah Indonesia. Justeru untuk mengeksploitasi kekayaan-kekayaan laut yang berdekatan dengan pantailah maka banyak negara melebarkan laut wilayahnya apalagi setelah diketahui bahwa didasar laut yang berdekatan dengan pantainya kaya dengan sumber-sumber mineral di samping kekayaan laut itu sendiri dengan berbagai jenis ikan seperti halnya Indonesia.

Dari segi politik ketentuan hukum laut yang lama sangat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Selama perairan anatar pulau-pulau Indonesia masih merasa diri terpisah-pisah satu sama lainnya. Keadaan yang demikian akan membantu usaha-usajha gerakan separatis dan Indonesia mempunyai pengalaman yang cukup terhadap gerakan-gerakan demikian dan telah berkali-kali membahayakan keutuhan wilayah dan kesatuan nasional. Jadi nayatalah bahwa ketentuan –ketentuan yang lama dalam pengaturan wilayah laut Indonesia jika tetap dipakai akan sangat merugikan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia.

Berbagai cara telah dipertimbangkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan Indonesia yang vital tersebut, antara lain dengan meluaskan lebar laut wilayahdan dengan mengadakan zona perikanan. Tetapi cara-cara ini tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital tersebut. Misalnya perluasan laut dari 3 mil menjadi 12 mil, masih tetap akan menimbulkan kantong-kantong laut bebas di beberapa bagian laut Indonesia yang penting, dan karena itu akan tetap menimbulkan masalah- masalah politis dan pertahanan keamanan nasional yang rumit bagi Indonesia. Pelebaran laut wilayah sampai 200 mil, jelas akan menjamin kepentingan kesatuan nasional yang vitas

tersebut.⁷ Karena itu satu-satunya jalan yang paling tepat untuk menjamin kepentingan Indonesia tersebut adalah melalui konsepsi *archipelago* atau wawasan nusantara.

Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan 770 suku bangsa, 726 bahasa, dan 19 daerah hukum adat. Secara fisik antar suku budaya dan budaya lain karena seluruh perairan yang ada di nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah. Dalam proses perkembangannya, tingkat integrasi dapat berbeda-beda baik secara geografis maupun secara politis, ekonomis, social dan kultural. Dengan diumumkannya Deklarasi Juanda ke dunia internasional pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri RI Djoeanda, patut disyukuri, jika tidak karena pengumuman tersebut maka wilayah Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai sebuah pulau dan perairan di antara pulau merupakan perairan internasional.

Penerimaan masyarakat internasional atas konsep negara kepulauan telah ditetapkan dalam Konvensi ukum Laut PBB melalui United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982. Dengan dasar hukum ini, diakui bahwa luas Republik Indonesia mencapai 1,9 juta mil dan terdiri dari 17.508 pulau. Kemudian dengan berbekal konsep Wawasan Nusantara, laut di antara pulau termasuk dalam laut teritorial Indonesia yang disebut laut pedalaman.

C. Penutup

Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago state*) diakui setelah disahkannya UNCLOS yang diandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 dan Indonesia telah meratifikasinya dengan undang-undang nomor 17 tahun 1985. Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut merupakan anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi nasional RI bertambah luas secara luar biasa, luas

⁷ Hasjim Djalal, *Perjuangan ndonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1989.

laut Indonesia meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah negara, dimana luas perairan mejadi satu kesatuan dengan daratan.

Dengan diterimanya deklarasi Juanda sebagai pedoman pengaturan negara kepulauan dalam hukum laut internasional maka sudah seharusnya pemerintah dapat terus melakukan pembaharuan hukum yang lebih baik lagi agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memiliki eksistensi sbagai negara maritim yang bermartabat. Hilangnya Sipadan dan Ligitan serta hilangnya pulau-pulau di selat Malaka, akibat pengerukan pasir dan juga masalah-masalah pulau terdepan yang rentan dijarah oleh pihak luar, maka sudah selayaknya demi menghargai perjuangan Juanda dan para negarawan Negri ini yang sangat serius memperjuangkan konsep negara kepulauan dimasa lalu, para elit sipil dan militer agar selalu mengedepankan kinerjanya agar supaya wilayah teritorial NKRI tidak hilang kembali seperti kasus sebelumnya. Adalah tanggungjawab semua anak bangsa ini untuk menjiwai semangat deklarasi bersejarah tersebut.

Daftar Kepustakaan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987.

S. Toto Pandoyo, *Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Hasjim Djalal, *Perjuangan ndonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1989.

